

KAJIAN EKSISTENSI DAN FUNGSI KELEMBAGAAN PADA USAHATANI PADI ORGANIK DI SUMATERA BARAT

Moehar Daniel dan Nieldalina

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat
Jalan Raya Padang-Solok Km. 40 Sumatera Barat
moehardaniel73@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Daerah Sumatera Barat sejak tahun 2008, telah mulai menggiatkan pengembangan usaha pertanian organik. Berbagai program dan kegiatan telah didanai agar bisa menghasilkan produk pertanian yang sehat serta berperan dalam melestarikan lingkungan. Pengembangan usaha yang dilakukan tidak hanya dalam proses budidaya tetapi juga aktif dalam pengembangan kelembagaan. Tetapi perkembangannya sampai saat ini belum begitu jelas dan tidak banyak informasi yang diperoleh. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk melihat sejauh mana eksistensi dan fungsi dari kelembagaan yang dikembangkan. Kajian dilakukan dengan pendekatan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) pada lima daerah utama yang tergolong sebagai sumber produksi padi sawah di Sumatera Barat. Pengembangan usahatani padi organik diawali dengan penumbuhan kelompok tani, sebagai wadah pemersatu petani dan pusat kegiatan usahatani padi organik. Disamping kelompok tani Pemerintah Propinsi Sumatera Barat juga menumbuhkan lembaga sertifikasi pertanian organik sebagai satgas usahatani organik dan lembaga Persatuan Petani Organik sebagai kelembagaan pakar yang membina usahatani organik tingkat petani. Tetapi setelah lima tahun berjalan belum kelihatan dampak yang signifikan dari keberadaan lembaga-lembaga tersebut terhadap perkembangan usaha pertanian organik di Sumatera Barat. Diperoleh beberapa faktor yang dominan yang menjadi penyebab, diantaranya adalah belum maksimalnya operasional kelembagaan yang dibangun serta lemahnya sistem pemasaran dan kerjasama antar lembaga yang ada.

Kata kunci: padi organik, kelembagaan

PENDAHULUAN

Latar belakang

Upaya-upaya yang dilakukan serta biaya yang telah dibelanjakan pemerintah untuk pengembangan usahatani organik selama ini belum mampu memacu pertumbuhan yang diharapkan, terutama untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Minat sebagian besar petani terhadap pupuk dan pestisida masih tinggi, sementara penilaian dan preferensi masyarakat (konsumen) terhadap bahan pangan organik belum padu (Jamil *et al.*, 2013). Sebagian besar konsumen masih mengutamakan penampilan produk dibanding kualitas dan jaminan kesehatan bila mengkonsumsinya. Satu lagi gejala yang berkembang adalah, sulitnya memperoleh produk organik secara tepat dan berkelanjutan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, 2009; Sutanto, 2002). Dimana belum ada outlet ataupun pedagang yang menyediakan bahan pangan organik secara kontinu, karena belum konsistennya para petani menghasilkan produk (terutama padi sawah) secara organik.

Berdasarkan kajian, masalah utama yang harus dituntaskan adalah lemah dan belum berdayanya lembaga serta kelembagaan dalam sistem pertanian organik. Baik berupa lembaga petani maupun kelembagaan pengadaan saprodi dan pemasaran produk yang dihasilkan. Dari sekian banyak lembaga yang telah dibentuk, tidak banyak yang bisa bertahan. Keterkaitan dan keterikatan petani dengan lembaganya

hanya sepanjang (menjelang) bantuan diterima. Setelah itu, semua aktivitas semakin hari semakin menurun dan keberadaan lembaga semakin pudar (Daniel, 2013). Tujuan dan sasaran pembentukan lembaga menjadi tidak tercapai. Perkembangan ini merupakan hal yang biasa bagi para pemerhati petani atau pelaku yang sering bergelut dan berbaur dengan petani.

Sebenarnya, terjadinya dan berkembangnya kondisi tersebut semuanya adalah karena kurang tepatnya pendekatan dan kurang tepatnya perencanaan. Pola pembangunan yang “top down” sering mengkondisikan petani sebagai orang yang terpojok, dan harus menerima dan melakukan “apa” yang tidak dibutuhkan atau diinginkannya. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu perubahan, terutama dalam proses pendekatan dan pembinaan (Niidalina *et al.*, 2013). Perubahan dimaksud sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dalam proses pengembangan usaha pertanian organik. Beberapa lembaga telah dibentuk (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbang, 2010a, b) agar pertanian organik berkembang dan bisa mensejahterakan petani. Mulai dari kelompok tani, kelompok Pembina petani (Persatuan Petani Organik = PPO), outlet produk organik, kelembagaan sarana produksi dan sampai kepada kelembagaan sertifikasi usahatani organik (Lembaga Sertifikasi Organik = LSO).

Tetapi semua upaya dan langkah yang dilakukan tersebut juga belum mampu membuat pertanian organik menjadi pilihan petani untuk usaha utama maupun pilihan konsumen untuk bahan konsumsi yang utama. Berikut dikemukakan sebuah hasil tinjauan/kajian lapang mengenai kelembagaan pertanian organik dan kondisi yang berkembang di Sumatera Barat.

Tujuan kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi, masalah dan eksistensi kelembagaan pendukung usahatani padi organik di Sumatera Barat.

Keluaran (Output) yang Diharapkan

Kondisi dan peran lembaga pendukung usahatani padi organik di Sumatera Barat.

BAHAN DAN METODE

Ruang lingkup dan tahapan pengkajian

Ruang lingkup kegiatan meliputi kajian dasar perkembangan kondisi berdasarkan data sekunder (*desk study*), dilanjutkan dengan studi lapang. Dalam Studi Lapang, dikumpulkan data dari berbagai sumber yang terlibat dan berkaitan dengan kelembagaan pendukung usaha pertanian organik, seperti kelompok tani, lembaga pembina petani pelaku, kelembagaan sarana produksi dan pemasaran serta kelembagaan sertifikasi pertanian organik yang berjalan di Sumatera Barat.

Lokasi dan waktu pelaksanaan

Pengkajian dilakukan di Sumatera Barat dengan memilih daerah yang dikenal sebagai sentra pengembangan atau daerah yang lebih aktif dalam penerapan usaha pertanian organik, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Solok. Pengkajian dilaksanakan sejak Oktober sampai Desember 2012.

Pendekatan

Pengkajian dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu *desk study* dan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) yang lebih menjurus kepada diskusi grup (FGD). Setelah diperoleh informasi melalui data sekunder dari beberapa sumber yang terkait, dilakukan penelusuran lapang mencakup aparat pemerintah terkait, pemuka masyarakat, petani pelaku, pengurus lembaga pendukung, kelembagaan sarana produksi dan pemasaran serta lembaga sertifikasi usahatani padi organik.

Metode analisis

Analisis data yang dilakukan meliputi analisis kualitatif data yang diperoleh di lapang dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum dan komitmen

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan pertanian, termasuk usatani padi organik. Topografi dan sebaran wilayahnya cukup merata dan mendukung, termasuk keberadaan infrastruktur saat ini. Potensi ini juga menyebabkan daerah ini menjadi wilayah pertanian yang cukup kuat perannya di bagian wilayah Sumatera (bagian tengah), terutama dalam memasok kebutuhan wilayah propinsi tetangga seperti, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara. Peran ini sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu, dimana cukup banyak komoditas pertanian yang disalurkan, terutama beras. Komoditas-komoditas yang disalurkan umumnya dihasilkan oleh berbagai daerah kabupaten/kota dengan spesifikasi masing-masing. Kemampuan ini diperoleh karena Sumatera Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dan sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Perhatian dan komitmen pemerintah cukup kuat, dimana untuk pengembangan usaha pertanian telah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai, terutama dalam upaya pengembangan usaha pertanian organik dalam lima tahun belakangan ini (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, 2010b). Tidak hanya dalam pengembangan budidaya dan pasca panen, pemerintah juga komit dengan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumberdaya petani dan petugas yang terlibat di dalamnya.

Eksistensi kelembagaan usahatani padi organik di Sumatera Barat

Kelompok tani

Kelembagaan utama yang eksis dalam proses pengembangan pertanian organik di tingkat pelaku adalah organisasi petani yang diwujudkan dalam bentuk Kelompok Tani. Para petani dihimpun dalam sebuah organisasi untuk memudahkan bagi aparat untuk melaksanakan pembinaan di lapang. Bantuan dan binaan yang diberikan dan dilaksanakan hanya menjurus kepada kelompok yang sudah terbentuk dan di tetapkan oleh aparat nagari (desa) setempat bersama dengan aparat pertanian di lapang. Setelah kelompok dibentuk lengkap dengan pengurusnya dilakukan pembinaan secara berkelanjutan. Usaha dan percontohan dilakukan di lahan kelompok yang ditetapkan, sementara masing-masing petani anggota juga diharuskan menerapkan usahatani padi organik di lahan pribadinya.

Dari puluhan kelompok yang telah terbentuk dan berjalan, tidak banyak petani yang menerapkan usahatani padi organik di lahan usaha sendiri. Bahkan lahan kelompokpun saat ini sudah banyak yang diabaikan, tidak lagi menerapkan usahatani organik. Peran dan fungsi kelompok melalui pengurusnya tidak banyak membantu dan mendorong berkembangnya usahatani organik, kecuali hanya satu dua kelompok yang personilnya masih konsisten mempertahankan usahatani padi organik di lahan sendiri.

Disamping lemahnya komitmen pengurus, bisa dikemukakan beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kemunduran usahatani organik (1) peningkatan produktivitas berjalan lambat karena rendahnya kualitas sarana produksi yang digunakan, (2) nilai produk yang dihasilkan tidak lebih tinggi dibanding produk anorganik, dan (3) curahan waktu dan tenaga untuk usahatani padi organik lebih intensif, walaupun secara nyata biaya yang dikeluarkan lebih rendah.

Persatuan petani organik

Disamping membina Kelompok Tani Organik, Pemerintah Sumatera Barat juga memanfaatkan para petani organik yang berhimpun dalam sebuah kelompok (PPO = Persatuan Petani Organik). Para petani organik yang terhimpun tersebut dilatih dan dibina untuk dijadikan "petani pakar". Mereka diberi tugas untuk membina dan melatih para petani yang berminat dan tergabung dalam kelompok tani organik. Secara teoritis, jelas bahwa lembaga ini akan sangat bermanfaat dan berperan dalam mengembangkan usahatani padi organik. Tetapi tetap saja usahatani tersebut tidak berkembang dengan baik dan mulai ditinggalkan oleh sebagian besar anggota kelompok-kelompok tani yang sudah eksis.

Tidak berkembangnya usahatani padi organik tidak bisa dipikulkan kepada kinerja para petani pakar yang terhimpun didalam PPO. Kinerja mereka baik dan bersemangat, pendekatan mereka juga baik dan diterima dengan baik oleh para petani, mereka diberi insentif dan dana perjalanan oleh pemerintah. Masalahnya, berat dugaan kepada melemahnya komitmen petani yang disebabkan oleh beberapa kondisi di atas. Lembaganya bagus, aparat dan anggotanya juga komit dengan tupoksinya, hanya saja ada hal lain yang membuat usaha mereka menjadi sia-sia.

Kelembagaan pendukung usahatani padi organik

Dalam upaya pengembangan usahatani padi organik banyak hal dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Barat. Berikut diuraikan beberapa contoh yang berhubungan dengan kelembagaan. Yang pasti beberapa program seperti UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik), APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik), RP3O (Rumah Pengolahan dan Penyimpanan Pupuk Organik), pengadaan pupuk organik serta program dan kegiatan lainnya telah diterima dan dilaksanakan.

Institut pertanian organik (IPO)

Pemerintah mendirikan sebuah institut yang dilengkapi dengan lahan dan usaha percontohan pertanian organik. Di lembaga ini petani dan petugas dan pemerhati pertanian organik dilatih dan digembleng untuk memahami dan menerapkan usahatani organik. Para lulusan diberi sertifikat sebagai pertanda sudah lulus dan sudah menguasai sistem usaha pertanian organik, dan diharapkan akan mengembangkan usaha tersebut di lokasinya masing-masing.

Sampai saat ini, lembaga tersebut masih ada dan masih berjalan. Satu hal yang sangat janggal dan berkembang adalah, di sekitar institut ini tidak banyak petani yang menerapkan usahatani secara organik. Begitu juga dengan para petani dan pelaku lainnya yang pernah ikut pelatihan dan punya sertifikat secara berangsur telah kembali kepada usaha pertanian secara konvensional. Usaha pertanian organik kebanyakan hanya tinggal simbol dan hanya ada petak-petak tertentu sebagai bentuk percontohan.

Kelembagaan sarana produksi

Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah Sumatera Barat juga telah mengalokasikan dana pembangunan untuk penyediaan dan pelatihan serta pembuatan sarana produksi organik yang dibutuhkan. Tim pakar dari PPO dan para petani organik yang maju dikerahkan untuk melatih pemula dan mengembangkan ramuan atau formula untuk penyediaan hara dan pestisida secara organik.

Kelemahan utama adalah produk yang dihasilkan mempunyai kandungan hara sangat rendah sehingga kurang mampu memacu peningkatan produktivitas. Begitu juga dengan ramuan nabati yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu mengendalikan serangan hama dan penyakit.

Kelembagaan peningkatan motivasi

Untuk meningkatkan motivasi masyarakat, Pemerintah menyediakan anggaran (APBD) yang cukup besar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kompensasi hasil melalui insentif (subsidi) harga produk organik (Rp 250,-/kg), untuk kompensasi tidak membakar jerami (Rp 200.000,-/ha), dana bantuan untuk urusan sertifikasi dan banyak lainnya. Sama halnya dengan lembaga-lembaga sebelumnya, kelembagaan ini juga tidak banyak perannya dalam mengembangkan usahatani organik. Secara perlahan dan bertahap, para petani organik mulai kembali ke usahatani yang konvensional.

Kelembagaan penyuluhan

Tidak berbeda dengan kelembagaan di atas, para penyuluh juga sudah kewalahan untuk tetap menyarankan dan membina petani agar konsisten dengan usahatani organiknya. Berbagai cara telah dilakukan, melalui pendekatan kekeluargaan, pendekatan sosial dan sebagainya, tetapi tetap saja komitmen dan motivasi petani semakin melemah terhadap usaha pertanian organik.

Bantuan yang telah diterima seperti sapi, alat pembuatan pupuk organik dan lainnya tetap dimanfaatkan tetapi praktek di lapang usahatani padi yang dilakukan secara perlahan mengarah kembali ke usahatani yang konvensional. Sepertinya usahatani padi organik akan ditinggalkan kalau tidak ada gerakan ataupun upaya untuk menghidupkan kembali. Upaya penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan cukup intensif, tidak banyak membantu. Bantuan dan saran tetap diterima tetapi penerapan di lapang tidak banyak yang diaplikasikan.

Kelembagaan pemasaran

Untuk menunjang aktivitas usahatani organik, Pemerintah Sumatera Barat juga sudah mengalokasikan anggaran untuk membangun jejaring kelembagaan pemasaran. Kegiatan ini dimulai dengan memfasilitasi petani bernegosiasi dengan pengusaha diikuti dengan fasilitasi untuk promosi ke konsumen. Kemudian diikuti dengan memfasilitasi pengadaan outlet produk pertanian organik. Lembaga yang dibentuk berperan mengumpulkan produk padi organik beserta produk pangan organik lainnya untuk diteruskan ke konsumen. Harga yang berlaku ditetapkan berdasarkan keputusan dari produsen.

Pada awalnya usaha ini berjalan lancar dan sepertinya akan mampu meningkatkan minat dan usaha petani. Tetapi setelah berjalan satu tahun, mulai kelihatan terjadi penurunan. Pada saat konsumen mulai tertarik dan konsisten mengkonsumsi produk organik, pasokan dari petani terputus. Kadang-kadang tersedia, kadang-kadang tidak. Kondisi ini membuat konsumen yang telah mulai terikat dengan produk pertanian organik menjadi kecewa dan terpaksa kembali mengkonsumsi produk pertanian konvensional (Dinas Pertanian Sumbar, 2010b). Begitu juga halnya dengan kelembagaan pemasaran yang “door to door” dari kantor ke kantor. Banyak konsumen yang kecewa, disaat dibutuhkan produk tidak tersedia sehingga mereka kembali mengkonsumsi produk konvensional.

Lembaga sertifikasi organik (LSO)

Satu lagi lembaga yang dibentuk dan dibangun oleh Pemerintah Sumatera Barat adalah LSO. Lembaga ini menempatkan para pembina, pengawas dan pendamping usaha pertanian organik. Mereka dilatih dan diberdayakan dalam lembaga ini yang bersifat “Satgas” (satuan tugas). Satgas ini menilai, membina dan mengawasi serta menetapkan (mensertifikasi) lahan dan usaha pertanian organik secara legal. Lembaga ini menghimpun tenaga-tenaga ahli dan inspektur handal untuk mengawal seluruh proses penanaman pangan organik sehingga dapat disertifikasi sesuai dengan regulasi yang ada.

Lembaga yang berfungsi sebagai wasit dan penentu keabsahan “organik” atau tidaknya produk yang dihasilkan petani ini kadang-kadang berperan sebagai motivator, tetapi adakalanya menjadi faktor yang menurunkan semangat dan motivasi petani untuk menjalankan usahatani padi secara organik. Persyaratan dan pembinaan yang dilakukan sangat ketat bahkan terkesan berlebihan, baik mengenai upaya dan persyaratan teknis maupun upaya dan persyaratan administratif.

Secara prinsip memang diakui bahwa lembaga ini sangat dibutuhkan terutama dalam menjamin keorganikan produk yang dihasilkan. Tetapi disisi lain masih banyak kelemahan yang ditemui, baik mengenai aturan yang diberlakukan maupun kinerja aparat yang diberi wewenang. Akibatnya terjadi hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan dan diprogramkan oleh pemerintah. Disatu sisi pemerintah ingin mengembangkan usaha dan produk pertanian organik dan disisi lain lembaga yang ditugaskan untuk pembinaan terkesan memperlambat upaya pengembangan di tingkat pelaku.

Masalah dan titik lemah dalam sistem pengembangan pertanian organik

Gambaran kondisi dan perkembangan yang terjadi memberikan sinyal adanya masalah yang terjadi sehingga usahatani padi organik semakin melemah dan seolah telah hilang. Disamping faktor-faktor harga dan teknis budidaya, ada faktor lain yang dominan yang mempengaruhi sehingga komitmen petani melemah. Bermula dari harga yang kurang tepat dan menguntungkan, kondisi menjadi lebih buruk dengan kurang tepatnya pendekatan dan pembinaan yang dilakukan. Belum lagi adanya dualisme yang bertentangan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah dengan lembaga sertifikasi organiknya.

Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kemunduran diperkirakan adalah sistem yang dilakukan dalam pembinaan. Tidak adanya pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan berdampak kepada menurunnya motivasi pelaku dan stagnannya kualitas sumberdaya manusia petani. Disamping itu, yang tidak kalah pengaruhnya adalah komitmen dan preferensi masyarakat (konsumen) yang bisa disebut masih abu-abu, atau belum mempunyai komitmen yang kuat untuk selalu mengkonsumsi produk pertanian organik (Wangsit dan Supriyana, 2003). Belum banyak petani dan lembaganya yang betul-betul berkomitmen dengan usaha pertanian yang merupakan sumber kehidupannya secara organik total. Umumnya para petani masih mendua, melaksanakan usaha pertanian organik tetapi di lain pihak dan di lain

persil lahan juga masih menerapkan usahatani yang konvensional. Penerapan komponen teknologi pertanian organik secara menyeluruh belum banyak yang melakukan secara kontinyu.

KESIMPULAN

Kelembagaan yang berkaitan dengan pertanian organik di Sumatera Barat cukup berfungsi dalam menggiatkan kegiatan tetapi fungsi tersebut belum mampu berperan sebagai faktor pelancar pengembangan usaha pertanian organik di Sumatera Barat. Banyak faktor yang mempengaruhi melemahnya perkembangan pertanian organik, salah satunya adalah kurang tepatnya sistem yang dilakukan.

Perlu dilakukan perubahan pada sistem yang dilakukan dalam pengembangan usaha pertanian organik, disarankan untuk melakukan pendampingan (melalui kelembagaan) yang berkelanjutan serta fasilitasi yang lebih intensif dalam proses promosi dan pemasaran. Peran institusi lain, terutama yang berkaitan dengan pengadaan sarana produksi yang efektif dan perbaikan teknologi sangat dibutuhkan.

Beberapa solusi dan kebijakan dapat diusulkan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan program pengembangan pertanian organik ke depan, diantaranya adalah:

1. Duduk bersama antara pengambil kebijakan, institusi pendukung, pelaku dan penyalur padi organik
2. Perubahan beberapa kebijakan yang telah diterapkan, terutama menyangkut legalitas dan konsistensi usahatani padi organik
3. Promosi dan himbauan yang intensif akan manfaat dan keberadaan padi/beras organik

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel M. 2013. Eksistensi petani dan proses pemberdayaan. Bagian dari buku Bunga Rampai Eksistensi Petani Indonesia. Penerbit Kristal Multi Media, Bukittinggi.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat. 2009. Peluang Investasi Pangan Organik.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat. 2010a. Pangan Organik.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Barat. 2010b. Pertanian Organik.
- Jamil A, Nieldalina dan Y Sulaeman. 2013. Pertanian organik, pemberdayaan petani dan penguatan ketahanan pangan. Bagian dari buku Bunga Rampai Eksistensi Petani Indonesia. Penerbit Kristal Multi Media, Bukittinggi.
- Nieldalina, Azwir, Iswari K dan R Wahyuni. 2013. Gerakan serta dampak pemberdayaan petani dan kelembagaan di Sumatera Barat. Bagian dari buku Bunga Rampai Eksistensi Petani Indonesia. Penerbit Kristal Multi Media, Bukittinggi.
- Sutanto R. 2002. Pertanian Organik : Menuju Pertanian Alternatif dan Berkelanjutan. Kanisius Yogyakarta. hlm. 19-31.
- Wangsit S dan Supriyana D. 2003. Belajar dari Petani : Kumpulan Pengalaman Bertani Organik. SPTN-HPS-Lesman-Mitra Tani, didukung Oleh Oxfam GB-VSO/SPARK-CRS. hlm. 20-27.